



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL  
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI BANTEN**

**TRIWULAN II  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan di daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Serang, Juli 2023

**KEPALA,**

Ttd.

**Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM**

NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                       | <i>Halaman</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                  | i              |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                       | ii             |
| EXECUTIVE SUMMARY.....                                                                                                                                                | iii            |
| <br>                                                                                                                                                                  |                |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                      | <b>I - 1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                                              | I - 1          |
| 1.2. Ruang Lingkup.....                                                                                                                                               | I - 2          |
| 1.3. Dasar Hukum .....                                                                                                                                                | I - 3          |
| 1.4. Tujuan .....                                                                                                                                                     | I - 4          |
| 1.5. Metode Evaluasi RKPD .....                                                                                                                                       | I - 5          |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                      | I - 7          |
| <br>                                                                                                                                                                  |                |
| <b>BAB II    EVALUASI    PELAKSANAAN    RENCANA    KERJA<br/>             PEMERINTAH    DAERAH    (RKPD)    PROVINSI    BANTEN<br/>             TAHUN 2023 .....</b>  | <b>II - 1</b>  |
| 2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program<br>Pembangunan Tahun 2023 .....                                                                                           | II - 1         |
| 2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan<br>Program Prioritas .....                                                                                        | II - 5         |
| 2.3. Relevansi Program RPD Dengan RKPD .....                                                                                                                          | II - 9         |
| 2.4. Relevansi Program RKPD Dengan APBD .....                                                                                                                         | II - 10        |
| <br>                                                                                                                                                                  |                |
| <b>BAB III    EVALUASI    HASIL    RENCANA    KERJA    PEMERINTAH<br/>             DAERAH    (RKPD)    PROVINSI    BANTEN    TAHUN    2023<br/>             .....</b> | <b>III - 1</b> |
| 3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro .....                                                                                                                            | III - 1        |
| 3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 .....                                                                                                                    | III - 11       |
| 3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2023 ...                                                                                                    | III - 14       |
| 3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi<br>Anggaran Triwulan II Tahun 2023 .....                                                                  | III - 21       |
| <br>                                                                                                                                                                  |                |
| <b>BAB IV    ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....</b>                                                                                                               | <b>IV - 1</b>  |
| 4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan II TA. 2023                                                                                                          | IV - 1         |
| 4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II TA. 2023...                                                                                                        | IV - 1         |
| 4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....                                                                                                              | IV - 4         |
| <br>                                                                                                                                                                  |                |
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b>                                                                                                                                          | <b>V - 1</b>   |

## RINGKASAN

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD di Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebesar Rp. 11.774.651.290.753 dan terealisasi sebesar Rp. 4.476.487.715.821 atau 38,02%.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023-2026 sebanyak 33 Indikator, dimana yang telah tercapai sampai dengan Triwulan II sebanyak 18 indikator dan sebanyak 15 indikator berprogress mencapai target kinerja 2023. Hal lainnya pada capaian Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di 34 Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 79 indikator baru akan terhitung di triwulan berikutnya.

Pelaksanaan RKPD pada Triwulan II TA 2023 secara umum terkendala proses lelang dan implementasi P3DN, ada juga terkait e-katalog yang beberapa item belum semua tersedia.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan II RKPD Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *feed back* dalam pelaksanaan program pembangunan periode selanjutnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi, evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan menengah daerah RPD 2023-2026, hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana tujuan dan sasaran daerah, serta pelaksanaan pengendalian Paerangkat Daerah mulai dari sasaran,

- program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;
2. Mengidentifikasi kendala dan hasil realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPD 2023-2026 dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## **1.2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

### 1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;



15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### **1.4. TUJUAN**

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

#### **1.5. METODE EVALUASI RKPD**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2023. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan I). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan II Tahun 2023.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulanan, dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

**1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023

BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V : PENUTUP

**BAB II**

**KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2023. Pada tahun pengendalian 2023 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir periodesasinya.

**2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2022**

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2023 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023**

| RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah                      | APBD dan Laporan Triwulan | Kesesuaian |       | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------|---------------------|
|                                                               |                           | Ya         | Tidak |          |               |                     |
| (1)                                                           | (2)                       | (3a)       | (3b)  | (4)      | (5)           | (6)                 |
| Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2023 |                           |            |       |          |               |                     |
| Prioritas dan Sasaran Pembangunan                             | KUA                       | √          | -     | -        | -             | -                   |

| RKPD dan Kumpulan<br>Renja Perangkat<br>Daerah                                    | APBD dan<br>Laporan<br>Triwulan | Kesesuaian |       | Evaluasi | Tindak<br>Lanjut | Hasil<br>Tindak<br>Lanjut |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|----------|------------------|---------------------------|
|                                                                                   |                                 | Ya         | Tidak |          |                  |                           |
| (1)                                                                               | (2)                             | (3a)       | (3b)  | (4)      | (5)              | (6)                       |
| Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif                        | PPAS                            | √          | -     | -        | -                | -                         |
| Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2023 |                                 |            |       |          |                  |                           |
| Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah                               | RKA Perangkat Daerah            | √          | -     | -        | -                | -                         |
| Realisasi Capaian Kinerja                                                         |                                 |            |       |          |                  |                           |
| Realisasi Pencapaian Target                                                       | Triwulanan                      |            |       |          |                  |                           |
| Penyerapan Dana                                                                   | Triwulanan                      |            |       |          |                  |                           |
| Kendala Pelaksanaan                                                               | Triwulanan                      |            |       |          |                  |                           |

**2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Yang Disertai Kerangka Pendanaan Tahun 2023**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dikumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan program pembangunan tahun 2023 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen

RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.  
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2023

| VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                                                                                   |                                                                             |             |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| No                                                                       | Misi                                                                              | Tujuan                                                                               | Indikator Tujuan                                               | Sasaran                                                                           | Indikator Sasaran                                                           | 2021 (Awal) | Target Tahun 2023 | 2026 (Akhir) |
| 1                                                                        | Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas | Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia | Tingkat Kemiskinan                                             | Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera                                          | Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)                                 | 52,83       | 58,13             | 71,06        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan                   | Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)                                       | 0,644       | 0,665             | 0,695        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | Meningkatnya Pelayanan Sosial                                                     | Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen) | 7,71        | 7,74              | 7,79         |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026) | Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                            | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)                         | 64,48       | 65,19             | 66,24        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)               | Meningkatnya Pemerataan Akses                                                     | Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)                                      | 8,93        | 9,11              | 9,40         |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | dan Kualitas Pendidikan Masyarakat                                                | Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)                                        | 13,02       | 13,75             | 14,30        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                        | Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)                                         | 70,02       | 70,40             | 70,83        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                                                                                   | Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)                            | 24,50       | 23,50             | 22,00        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender                         | Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)                                   | 91,67       | 93,07             | 93,91        |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                | Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya | Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)                               | 52,63       | 55,03             | 58,63        |

| VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  |                                                                                     |                                                                        |             |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| No                                                                       | Misi                                                                              | Tujuan                                                                                  | Indikator Tujuan                                                 | Sasaran                                                                             | Indikator Sasaran                                                      | 2021 (Awal) | Target Tahun 2023 | 2026 (Akhir)  |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  |                                                                                     | Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)                 | 48,67       | 49,42             | 51,67         |
| 2                                                                        | Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan | Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi                     | Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026) | Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha                                              | Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)            | 3,87        | 3,97              | 6,82          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan                             | LPE sektor industri (Satuan: persen)                                   | 4,93        | 4,99              | 5,69          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  |                                                                                     | LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)                                | 1,84        | 2,44              | 4,24          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                              | LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)             | 4,30        | 4,39              | 4,66          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan                               | LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)                     | 0,56        | 0,68              | 1,04          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)              | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis | Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)                        | Tinggi      | tinggi            | Sangat tinggi |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)                    | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                   | Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah) | 12.033      | 12,168            | 12.573        |
| 3                                                                        | Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari         | Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam             | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)                       | 62,94       | 62,99             | 63,14         |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  | Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana                   | Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)                                  | 149,08      | 147,37            | 140,02        |
| 4                                                                        | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa          | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa                    | Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)           | Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi                                    | Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)                        | 65,88       | 69,77             | 80,00         |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                  |                                                                                     | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)                     | 55,89       | 82,20             | 87,60         |

| VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |      |        |                  |                                                               |                                                           |               |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| No                                                                       | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                                       | Indikator Sasaran                                         | 2021 (Awal)   | Target Tahun 2023 | 2026 (Akhir) |
|                                                                          |      |        |                  |                                                               | Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)              | 2             | 2-3               | 2-3          |
|                                                                          |      |        |                  |                                                               | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)        | 3,45          | 3,47              | 3,53         |
|                                                                          |      |        |                  | Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level) | Cukup Tangguh | Cukup Tangguh     | Tangguh      |

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                                     | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                      | 8              | 23              |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                                      | 5              | 19              |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                              | 11             | 20              |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                        | 8              | 19              |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja                                                           | 3              | 11              |
| 6  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                  | 2              | 11              |
| 7  | Dinas Sosial                                                                         | 6              | 19              |
| 8  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                  | 6              | 20              |
| 9  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | 14             | 38              |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan                                                               | 5              | 14              |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                 | 15             | 33              |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                               | 5              | 12              |
| 13 | Dinas Perhubungan                                                                    | 4              | 16              |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                              | 5              | 13              |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                             | 6              | 14              |
| 16 | Dinas Penanaman Modal                                                                | 6              | 14              |



| NO            | PERANGKAT DAERAH                           | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
|               | dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           |                |                 |
| 17            | Dinas Kepemudaan dan Olahraga              | 4              | 14              |
| 18            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           | 4              | 14              |
| 19            | Dinas Kelautan dan Perikanan               | 6              | 25              |
| 20            | Dinas Pariwisata                           | 5              | 16              |
| 21            | Dinas Pertanian                            | 7              | 24              |
| 22            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral       | 5              | 16              |
| 23            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan        | 10             | 23              |
| 24            | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah       | 8              | 30              |
| 25            | Sekretariat DPRD                           | 2              | 17              |
| 26            | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah   | 4              | 19              |
| 27            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3              | 10              |
| 28            | Badan Pendapatan Daerah                    | 2              | 9               |
| 29            | Badan Kepegawaian Daerah                   | 2              | 12              |
| 30            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | 2              | 10              |
| 31            | Badan Penghubung                           | 2              | 7               |
| 32            | Inspektorat                                | 3              | 11              |
| 33            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          | 6              | 12              |
| <b>JUMLAH</b> |                                            | <b>184</b>     | <b>558</b>      |

### 2.3. Relevansi Program RPD Dengan RKPD

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 184 program dan 558 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

#### **2.4. Relevansi Program RKPD Dengan APBD**

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 184 program yang direncanakan dalam APBD. Program-program yang terdapat dalam RKPD yaitu berjumlah 184 program seluruhnya dianggarkan dalam APBD, hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh program dalam RKPD menjadi prioritas dalam pembangunan, meskipun arah dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 Provinsi Banten bersifat tematik.

Terkait dengan anggaran APBD 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 11.774.651.290.735, hal tersebut menyesuaikan dengan asumsi struktur anggaran.

BAB III  
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

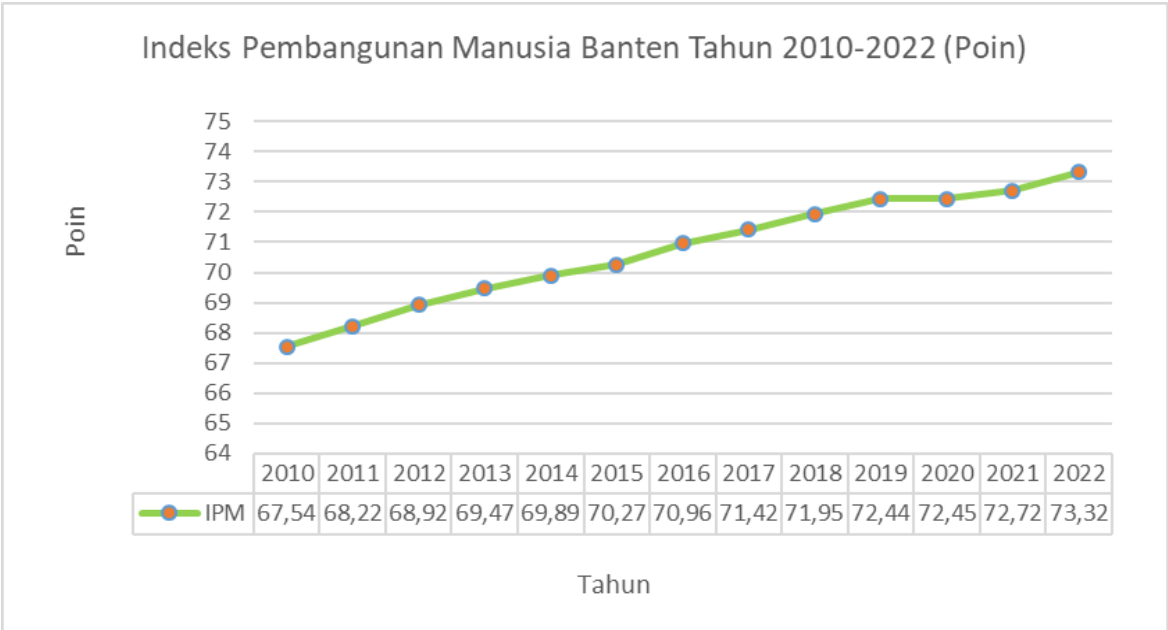
| No | Indikator                          | Satuan | Realisasi 2022 | Target RKPD 2023 | Realisasi Triwulan II | Keterangan              |
|----|------------------------------------|--------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Poin   | 73,32          | 73,27            | 73,32                 | Realisasi Tahun 2022    |
| 2  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)     | Persen | 5,03           | 5,02-5,15        | 4,68                  | Realisasi Tw 1 2023     |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 8,09           | 8,67             | 7,97                  | Realisasi Februari 2023 |
| 4  | Tingkat Kemiskinan                 | Persen | 6,24           | 5,58             | 6,24                  | Realisasi Tahun 2022    |
| 5  | Indeks Gini                        | poin   | 0,377          | 0,354            | 0,377                 | Realisasi Tahun 2022    |

Sumber: RKPD 2023, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Gambar 3.1  
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,60-73,60

poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,35 triliun atau 13,64% dari belanja

daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

**Tabel 3.2**  
**Target Komponen Indikator IPM Tahun 2023**

| No | Indikator IPM                | Target Tahun 2023 |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1  | Angka Harapan Hidup (AHH)    | 70,40 Tahun       |
| 2  | Harapan Lama Sekolah (HLS)   | 13,75 Tahun       |
| 3  | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 9,11 Tahun        |
| 4  | Pengeluaran Perkapita        | Rp. 12.168.000    |

Sumber:BPS Provinsi Banten

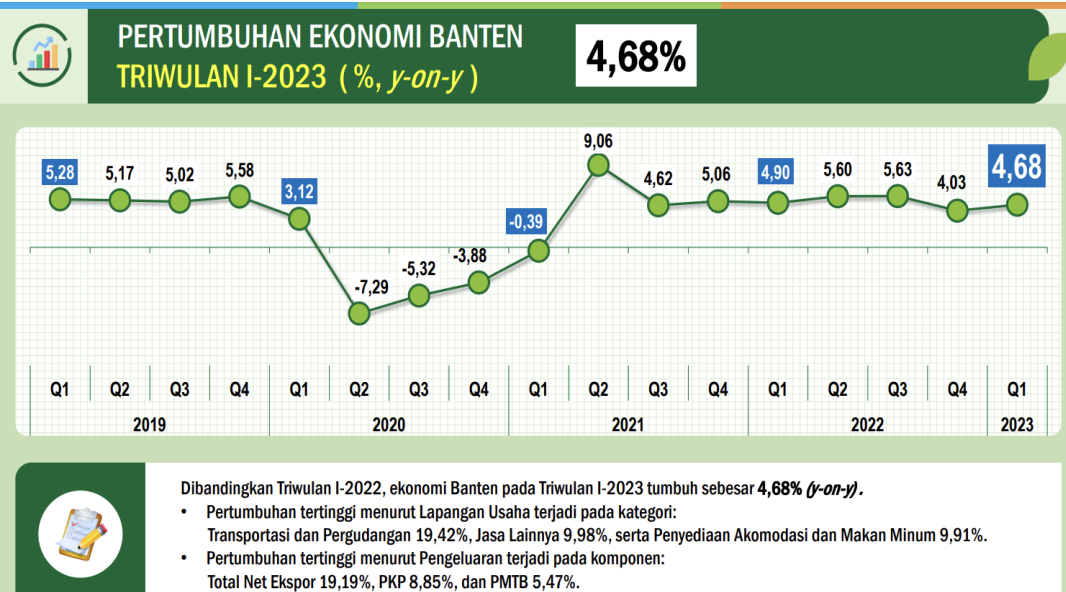
**3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Pemerintah RI resmi mencabut kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022. Pada triwulan I-2023, mobilitas penduduk dan aktivitas perekonomian sudah mendekati kondisi pra pandemi COVID-19. • Momen cuti bersama dan perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Suci Nyepi turut menopang beberapa aktivitas perekonomian, diantaranya pada sektor transportasi dan pariwisata. • Momen persiapan dan minggu pertama Bulan Ramadan di triwulan I-2023 turut mendorong konsumsi masyarakat. • Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) secara nasional pada triwulan I-2023 mencapai 50,75%, lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya dan masih berada pada fase ekspansi (indeks > 50%). Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi TW 1 2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

Secara kumulatif, ekonomi Banten triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 tumbuh sebesar 4,68% (c-to-c). Seluruh leading sector, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat serta Pertanian melanjutkan tren positif sejak triwulan I-2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan.

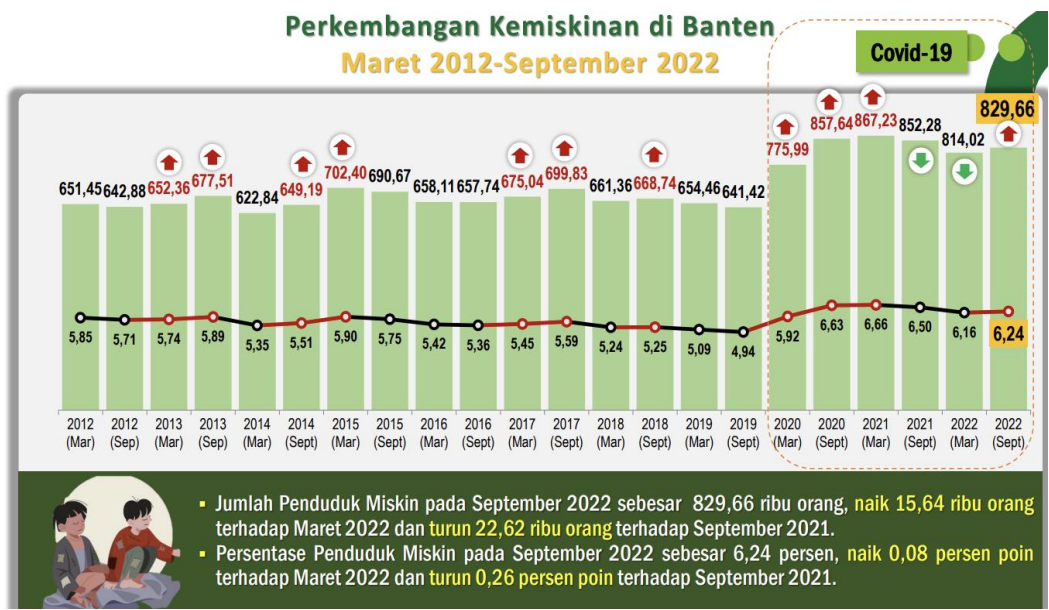
Beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten pada triwulan I-2023 adalah sector industry sebesar 30,22%, Perdagangan besar 12,56% dan konstruksi 11,84%. Untuk sector yang mengalami pertumbuhan terbesar pada TW 1 adalah transportasi pergudangan 19,42% dan penyediaan akomodasi 9,91%. Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif Industri Makanan Minuman, Industri Logam Dasar; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; serta

Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik. Perdagangan tumbuh lebih cepat dengan ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pasca pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM. Informasi Penjelaras Konstruksi tumbuh melambat, Pertumbuhan Konstruksi didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi pemerintah, seperti Jalan Tol Serang-Panimbang, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kawasan bisnis dan pemukiman.

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor : No. 05/01/36/Th. XVII, 16 Januari 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022.

Gambar 3.3 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2012-2022



Sumber:BPS Provinsi Banten

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, meningkat 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 22,62 ribu orang terhadap September 2021.Persentase penduduk miskin



perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintergrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021 – September 2022**

| No | Daerah/Tahun   | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang) | Persentase Penduduk Miskin |
|----|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Perkotaan      |                                     |                            |
|    | September 2021 | 576,62                              | 6,04                       |

|                      |                |        |      |
|----------------------|----------------|--------|------|
|                      | Maret 2022     | 566,49 | 5,73 |
|                      | September 2022 | 586,21 | 5,89 |
| <b>2   Perdesaan</b> |                |        |      |
|                      | September 2021 | 275,66 | 7,72 |
|                      | Maret 2022     | 247,54 | 7,46 |
|                      | September 2022 | 243,45 | 7,29 |
| <b>Total</b>         |                |        |      |
|                      | September 2021 | 852,28 | 6,50 |
|                      | Maret 2022     | 814,02 | 6,16 |
|                      | September 2022 | 829,66 | 6,24 |

Sumber: BPS Provinsi Banten

3.1.4.   **Tingkat Pengangguran**

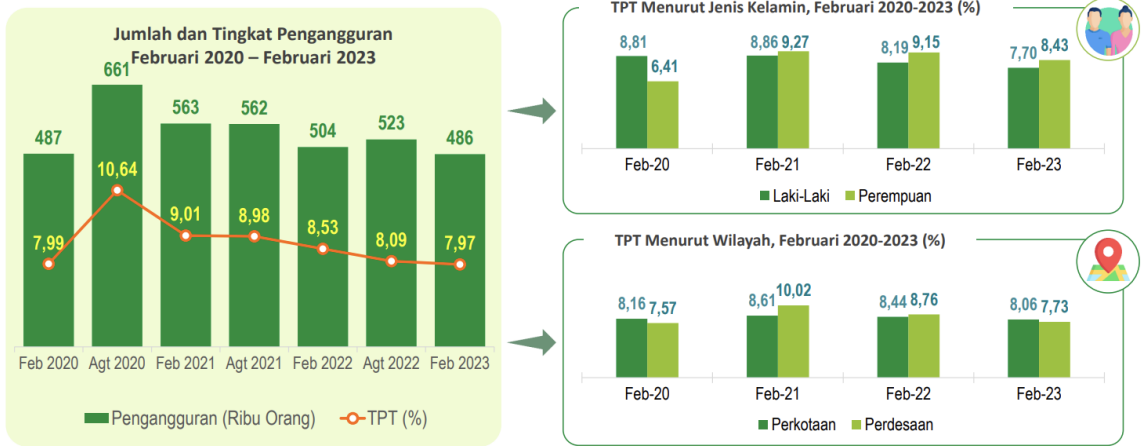
Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Membaiknya kondisi perekonomian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 212 ribu orang, dan berkurangnya pengangguran sekitar 17,9 ribu orang, jumlah pengangguran pada Februari 2023 sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97%. Dimana TPT tertinggi pada tingkat pendidikan SMA dan TPT terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Februari 2023 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 6,1 juta orang, naik 194,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,86 persen poin menjadi 65,94%.

**Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Pengagguran 2020-2023**

## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUN

Kondisi ketenagakerjaan semakin membaik seiring dengan penguatan ekonomi



Sumber:BPS Provinsi Banten

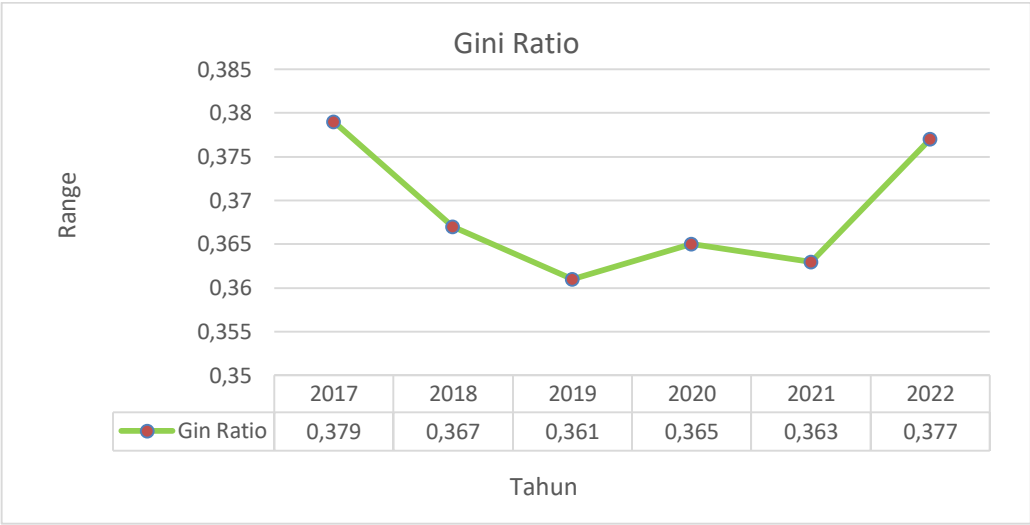
### 3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,377 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377.

Berdasarkan target perubahan RKPD perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%.

Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2017-2022



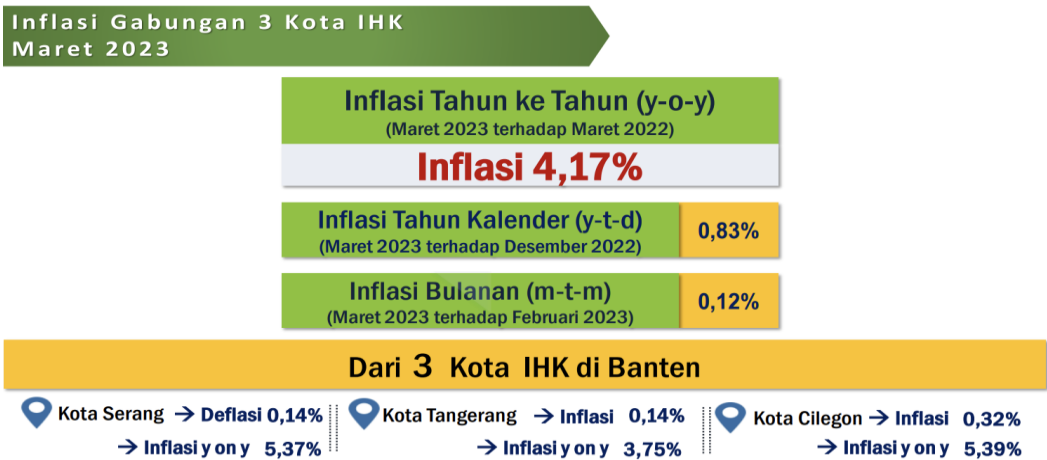
Sumber: BPS Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi pada bulan Maret 2023 tercatat 4,17% yang dihitung dari 3 Kota di ProvinsiBanten andil inflasi di Maret disebabkan pada komoditas Makanan, minuman dan tembakau dan transportasi.

Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi Maret 2023



Sumber :BPS Provinsi Banten

3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan tabel dibawah dari 33 Indikator Pemerintah daerah yang telah tercapai sebanyak 18 indikator dan sebanyak 15 indikator berprogress mencapai target, dijelaskan rinci sebagai berikut:

Tabel.3.4  
Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah

| No | Misi                                                                              | Tujuan/Sasaran                                                                       | Indikator tujuan/ Sasaran                        | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas | Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia | Tingkat Kemiskinan                               | 5,58              | 6,24                 |
|    |                                                                                   |                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                     | 8,67              | 7,97                 |
|    |                                                                                   |                                                                                      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai) | 73,27             | 73,32                |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)      | 58,13             | 52,83                |

| No | Misi                                                                              | Tujuan/Sasaran                                                                    | Indikator tujuan/Sasaran                                                    | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|    |                                                                                   | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan                   | Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)                                       | 0,665             | 0,6803               |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Pelayanan Sosial                                                     | Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen) | 7,74              | 7,71                 |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                            | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)                         | 65,19             | 65,94                |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Pemerataan Akses                                                     | Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)                                      | 9,11              | 9,13                 |
|    |                                                                                   | dan Kualitas Pendidikan Masyarakat                                                | Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)                                        | 13,75             | 15                   |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                        | Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)                                         | 70,40             | 70,96                |
|    |                                                                                   |                                                                                   | Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)                            | 23,50             | 20                   |
|    |                                                                                   | Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender                         | Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)                                   | 93,07             | 92,79                |
|    |                                                                                   | Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya | Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)                               | 55,03             | 52,63                |
|    |                                                                                   |                                                                                   | Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)                      | 49,42             | 48,67                |
| 2  | Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan | Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi               | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                    | 4,44%             | 4,68                 |
|    |                                                                                   |                                                                                   | Indeks Williamson                                                           | 0,625             | 0,620                |
|    |                                                                                   |                                                                                   | Indeks Gini                                                                 | 0,363             | 0,377                |

| No | Misi                                                                      | Tujuan/Sasaran                                                                          | Indikator tujuan/ Sasaran                                              | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|    |                                                                           | Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha                                                  | Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)            | 3,97              | 5,47                 |
|    |                                                                           | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan                                 | LPE sektor industri (Satuan: persen)                                   | 4,99              | 4,68                 |
|    |                                                                           |                                                                                         | LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)                                | 2,44              | 4,23                 |
|    |                                                                           | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                  | LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)             | 4,39              | 4,34                 |
|    |                                                                           | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan                                   | LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)                     | 0,68              | 3,38                 |
|    |                                                                           | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis     | Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)                        | tinggi            | tinggi               |
|    |                                                                           | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                       | Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah) | 12,168            | 12.216               |
| 3  | Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari | Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca                                         | 17                | 14,48                |
|    |                                                                           | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)                       | 62,99             | 63,52                |
|    |                                                                           | Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana                       | Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)                                  | 147,37            | 144,51               |
| 4  | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa                    | Indeks Reformasi Birokrasi                                             | 66                | 66,11                |

| No | Misi          | Tujuan/Sasaran                                                | Indikator tujuan/Sasaran                                  | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|    | dan Berwibawa |                                                               |                                                           |                   |                      |
|    |               | Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi              | Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)           | 69,77             | 67,20                |
|    |               |                                                               | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)        | 82,20             | 55,89                |
|    |               |                                                               | Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)              | 2-3               | 2,5                  |
|    |               |                                                               | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)        | 3,47              | 3,99                 |
|    |               | Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level) | Cukup Tangguh     | Cukup Tangguh        |

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 79 indikator yang dalam progress pencapaian di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Realiasi Kinerja Urusan S/d Triwulan II Tahun 2023

|  | INDIKATOR                                                              | SATUAN | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|--|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |                           |                                  |             |
|  | <b>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                               |        |                           |                                  |             |



|    | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1  | Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               | Persen | 100                       | 93,92                            | Progress    |
| 2  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun                                                           | Persen | 71,34                     | 69,08                            | Progres     |
| 3  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus             | Persen | 63,04                     | 18,11                            | Progress    |
| 4  | Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK                                                           | Persen | 12,7                      | 7,97                             | Progress    |
|    | <b>BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                             |        |                           |                                  |             |
| 5  | Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting                                | Persen | 40                        |                                  |             |
| 6  | Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan                                                                           | Persen | 76,92                     | 69,61                            | Progres     |
| 7  | Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)                                                                    | Kasus  | 81                        |                                  |             |
| 8  | Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)                                                                     | Kasus  | 4,7                       |                                  |             |
| 9  | Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit                                                                   | Persen | 100                       | 100                              |             |
|    | <b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                                                                            |        |                           |                                  |             |
| 10 | Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya | Nilai  | 3,20                      |                                  |             |
| 11 | Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan                                                              | Persen | 5                         |                                  |             |
|    | <b>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                      |        |                           |                                  |             |
| 12 | Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU                                          | Persen | 40                        |                                  |             |
| 13 | Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau                                                    | Persen | 32,42                     |                                  |             |
| 14 | Luas Permukiman Kumuh                                                                                               | Ha     | 277,63                    |                                  |             |
|    | <b>BIDANG SOSIAL</b>                                                                                                |        |                           |                                  |             |
| 15 | Persentase Penanganan Jumlah PMKS                                                                                   | Persen | 5,40                      | 6,98                             | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                     |        |                           |                                  |             |

|    | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN          | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 16 | Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi         | Persen          | 100                       | 100                              | Tercapai    |
| 17 | Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional | Persen          | 19,76                     |                                  |             |
| 18 | Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air                                                         | Persen          | 0,87                      |                                  |             |
| 19 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                                                              | Persen          | 100                       | 96,90                            | Progres     |
| 20 | Persentase Luas Layanan Irigasi                                                                      | Persen          | 62,81                     |                                  |             |
| 21 | Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi                                                   | Persen          | 43,86                     | 28,66                            | Progres     |
| 22 | Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan                                                                | Persen          | 94                        | 94,25                            | Progres     |
|    | BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                |                 |                           |                                  |             |
| 23 | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                                        | Indeks          | 0,55                      | 0,59                             |             |
| 24 | Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran                                                        | Persen          | 100                       |                                  |             |
| 25 | Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah                                                  | Persen          | 100                       |                                  |             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                |                 |                           |                                  |             |
|    | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                              |                 |                           |                                  |             |
| 26 | a. Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                       | Nilai           | 74,18                     |                                  |             |
| 27 | b. Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                         |                 | 54,44                     |                                  |             |
| 28 | c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)                                                                   |                 | 80,10                     |                                  |             |
|    | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                  |                 |                           |                                  |             |
| 29 | Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun                                 | Nilai           | 2,38                      | 2,11                             |             |
|    | BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                               |                 |                           |                                  |             |
| 30 | Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)                                                       | Triliyun Rupiah | 60,00                     |                                  |             |
| 31 | Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan                                                                  | Nilai           | 86,22                     |                                  |             |
|    | BIDANG KEARSIPAN                                                                                     |                 |                           |                                  |             |

|    | INDIKATOR                                                    | SATUAN | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 32 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan                            | Nilai  | BB                        | BB                               | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG PERSANDIAN</b>                                     |        |                           |                                  |             |
| 33 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                             | Nilai  | 273                       | 583                              | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG PANGAN</b>                                         |        |                           |                                  |             |
| 34 | Indeks Ketahanan Pangan Daerah                               | Nilai  | 70,73                     | 73,78                            | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                     |        |                           |                                  |             |
| 35 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                          | Nilai  | 91,80                     | 91,70                            | Progress    |
| 36 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)        | Nilai  | 3,25                      | 3,03                             | Progress    |
|    | <b>BIDANG TENAGA KERJA</b>                                   |        |                           |                                  |             |
| 37 | Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan                           | Nilai  | 68,26                     | 57                               | Progress    |
|    | <b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                        |        |                           |                                  |             |
| 38 | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)                            | Nilai  | 0,50                      | 0,45                             | Progress    |
| 39 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)                              | Nilai  | 50                        | 49                               | Progress    |
|    | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>   |        |                           |                                  |             |
| 40 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                             | Nilai  | 69,26                     | 69,09                            | Progress    |
| 41 | Indek Perlindungan Anak                                      | Nilai  | 74,55                     | 62,92                            | progress    |
|    | <b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                   |        |                           |                                  |             |
| 42 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                       | Nilai  | 13                        | 14,32                            | Progress    |
| 43 | Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat                           | Nilai  | 67,30                     | 65,70                            | Progress    |
|    | <b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |        |                           |                                  |             |
| 44 | Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi    | Persen | 100                       | 100                              | Progress    |
|    | <b>BIDANG STATISTIK</b>                                      |        |                           |                                  |             |
| 45 | Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral         | Persen | 100                       | 100                              | Progress    |
|    | <b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>            |        |                           |                                  |             |
| 46 | Persentase Koperasi yang Berkualitas                         | Persen | 25                        | 16,05                            | Progress    |
| 47 | Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister        | Persen | 5                         | 3                                | Progress    |
|    | <b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                    |        |                           |                                  |             |

|    | INDIKATOR                                                                  | SATUAN | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 48 | Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan           | Persen | 19,70                     |                                  |             |
| 49 | Rasio Konektivitas Provinsi                                                | Persen | 0,72                      | 0,70                             | Progress    |
| 50 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi   | Nilai  | 82,00                     | 79,60                            | Progress    |
|    | <b>BIDANG PERTANAHAN</b>                                                   |        |                           |                                  |             |
| 51 | Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan                                 | Persen | 100                       |                                  |             |
|    | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                             |        |                           |                                  |             |
| 52 | Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal          | Persen | 14,22                     | 18,98                            | Progress    |
| 53 | Persentas Desa Kategori Maju                                               | Persen | 13,49                     | 12,86                            | progres     |
|    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                         |        |                           |                                  |             |
|    | <b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                               |        |                           |                                  |             |
| 54 | Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral | Persen | 55,25                     | 26,08                            | progres     |
| 55 | Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan                     | Persen | 5                         | 2,46                             | Progress    |
| 56 | Rasio Elektrifikasi                                                        | Persen | 98,2                      | 99,99                            | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG KEHUTANAN</b>                                                    |        |                           |                                  |             |
| 57 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                                       | Indeks | 35,10                     | 39,06                            | Tercapai    |
|    | <b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                       |        |                           |                                  |             |
| 58 | NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten                      | POIN   | 102                       | 100,19                           | Progress    |
| 59 | Tingkat Produksi Sektor Perikanan                                          | Ton    | 246.569                   |                                  |             |
|    | <b>BIDANG PARIWISATA</b>                                                   |        |                           |                                  |             |
| 60 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)                            | Orang  | 20.060.922                | 8.483.861                        | Progress    |
|    | <b>BIDANG PERDAGANGAN</b>                                                  |        |                           |                                  |             |
| 61 | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                     | Persen | 13,48                     | 33,35                            | tercapai    |
|    | <b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                                |        |                           |                                  |             |
| 62 | Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri    | Persen | 6,43                      | 13,21                            | tercapai    |

|    | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN      | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
|    | <b>BIDANG PERTANIAN</b>                                                                   |             |                           |                                  |             |
| 63 | Produksi Peternakan                                                                       | Ton         | 225.907                   |                                  |             |
| 64 | Produksi Hortikultura                                                                     | Ton         | 23.714                    |                                  |             |
| 65 | Produksi Tanaman Pangan                                                                   | Ton         | 2.051.611                 |                                  |             |
| 66 | Produksi Perkebunan                                                                       | Ton         | 50.855                    |                                  |             |
|    | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                |             |                           |                                  |             |
|    | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                 |             |                           |                                  |             |
| 67 | Indeks Kelembagaan                                                                        | Nilai       | 41 - 60                   |                                  |             |
| 68 | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                 | Nilai       | 60                        |                                  |             |
| 69 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                              | Nilai       | 80,80                     | 64,5                             | Progress    |
| 70 | Kepatuhan Pelayanan Publik                                                                | Nilai       | 81,81                     | 67,18                            | Progress    |
| 71 | Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi                                                   | Nilai       | 10,77                     | 10,05                            | Progress    |
| 72 | Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan    | Persen      | 100                       | 11,17                            | Progres     |
| 73 | Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan | Persen      | 100                       | 25,33                            | Progres     |
| 74 | Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan        | Persen      | 100                       | 10                               | Progress    |
| 75 | Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah                                            | Persen      | 100                       | 48                               | Progress    |
| 76 | Persentase realisasi pelayanan SETDA                                                      | Persen      | 100                       |                                  |             |
| 77 | Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                 | Skor/ Nilai | 4,24                      | 2,70                             | Progress    |
|    | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                                                   |             |                           |                                  |             |
| 78 | Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD                                                       | Persen      | 100                       |                                  |             |
|    | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                               |             |                           |                                  |             |
|    | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                 |             |                           |                                  |             |
| 79 | Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI                                                     | Unit Kerja  | 1                         | 0                                | Progress    |
| 80 | Maturitas SPIP                                                                            | Nilai       | 3,14                      | 3,04                             | Progress    |

|    | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN          | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 | Ket Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 81 | Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal                                                | Nilai           | 14                        | 15,30                            | Tercapai    |
|    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                 |                 |                           |                                  |             |
|    | <b>KEUANGAN</b>                                                                            |                 |                           |                                  |             |
| 82 | Opini BPK                                                                                  | Opini           | WTP                       | WTP                              | Tercapai    |
| 83 | Kemandirian Keuangan                                                                       | Persen          | 63,55                     |                                  |             |
|    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                         |                 |                           |                                  |             |
| 84 | Indeks Inovasi Daerah                                                                      | Level           | Sangat Inovatif (60.01)   | Inovatif (50,41)                 | Progres     |
|    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                         |                 |                           |                                  |             |
| 85 | Indeks Merit Sistem                                                                        | Nilai           | 321,5                     | 321,5                            | Tercapai    |
| 86 | Indeks Profesionalitas ASN                                                                 | Nilai           | 24,48                     | 31,29                            | Tercapai    |
|    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                            |                 |                           |                                  |             |
| 87 | Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN                                         | Persen          | 10,23                     |                                  |             |
|    | <b>PERENCANAAN</b>                                                                         |                 |                           |                                  |             |
| 88 | Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran                                       | Kategori/ Nilai | 45                        | 41,85                            | Progress    |
|    | <b>PENGHUBUNG</b>                                                                          |                 |                           |                                  |             |
| 89 | Capaian Pelayanan Penghubung                                                               | Indeks          | 4                         |                                  |             |
|    | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                             |                 |                           |                                  |             |
|    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                         |                 |                           |                                  |             |
| 90 | Indeks Demokrasi Indonesia Banten                                                          | Nilai           | 77,55                     | 75,93                            | Progress    |
| 91 | Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani | Persen          | 100                       | 100                              |             |
|    | <b>NON URUSAN</b>                                                                          |                 |                           |                                  |             |
| 92 | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah          | Nilai           | 70-80                     |                                  |             |

Sumber: Data olahan Bappeda 2023

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2023, adapun yang masih belum baik dalam pencapaian realisasi kinerjanya adalah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Bidang Kelautan Dan Perikanan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Urusan

| BIDANG URUSAN                                                  | OPD                                                                                  | ANGGARAN          | REALISASI         | LEBIH/ (KURANG)     | PERSEN |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| PENDIDIKAN                                                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                      | 3.120.447.674.431 | 1.077.151.935.128 | (2.043.295.739.303) | 34,52  |
| KESEHATAN                                                      | DINAS KESEHATAN                                                                      | 1.155.420.581.657 | 390.943.111.377   | (764.477.470.280)   | 33,84  |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                              | 1.105.636.866.000 | 123.773.189.194   | (981.863.676.806)   | 11,19  |
| PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                        | 520.712.000.000   | 12.144.704.687    | (508.567.295.313)   | 2,33   |
| KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                  | 42.196.000.000    | 14.277.692.884    | (27.918.307.116)    | 33,84  |
|                                                                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                           | 49.994.000.000    | 18.147.530.226    | (31.846.469.774)    | 36,30  |
| SOSIAL                                                         | DINAS SOSIAL                                                                         | 112.528.000.000   | 29.808.690.192    | (82.719.309.808)    | 26,49  |
|                                                                | JUMLAH                                                                               | 6.106.935.122.088 | 1.666.246.853.688 | (4.440.688.268.400) | 27,28  |
|                                                                |                                                                                      |                   |                   |                     |        |
| TENAGA KERJA                                                   | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                               | 87.498.000.000    | 34.090.490.724    | (53.407.509.276)    | 38,96  |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 36.237.885.000    | 16.372.297.772    | (19.865.587.228)    | 45,18  |
| PANGAN                                                         | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                               | 50.389.000.000    | 9.450.435.229     | (40.938.564.771)    | 18,75  |
| PERTANAHAN                                                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                        | 500.000.000       | -                 | (500.000.000)       | -      |
| LINGKUNGAN HIDUP                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                 | 66.490.552.000    | 29.064.405.039    | (37.426.146.961)    | 43,71  |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 2.264.915.000     | 800.537.379       | (1.464.377.621)     | 35,35  |

| BIDANG URUSAN                                | OPD                                                                                  | ANGGARAN        | REALISASI       | LEBIH/ (KURANG)   | PERSEN |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA             | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                               | 32.129.000.000  | 9.845.116.663   | (22.283.883.337)  | 30,64  |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 6.883.400.000   | 3.108.160.078   | (3.775.239.922)   | 45,15  |
| PERHUBUNGAN                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                                                    | 72.735.000.000  | 30.955.896.966  | (41.779.103.034)  | 42,56  |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN                              | 65.000.178.900  | 22.966.472.870  | (42.033.706.030)  | 35,33  |
| KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                             | 27.394.781.000  | 10.467.972.419  | (16.926.808.581)  | 38,21  |
| PENANAMAN MODAL                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                               | 35.549.844.000  | 12.124.029.977  | (23.425.814.023)  | 34,10  |
| KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                        | 89.008.000.000  | 38.659.063.336  | (50.348.936.664)  | 43,43  |
| STATISTIK                                    | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN                              | 1.055.542.600   | 277.462.200     | (778.080.400)     | 26,29  |
| PERSANDIAN                                   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN                              | 2.750.278.500   | 255.212.919     | (2.495.065.581)   | 9,28   |
| KEBUDAYAAN                                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                      | 7.450.000.000   | 1.579.380.357   | (5.870.619.643)   | 21,20  |
| PERPUSTAKAAN                                 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                     | 25.762.237.000  | 9.696.444.909   | (16.065.792.091)  | 37,64  |
| KEARSIPAN                                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                     | 3.233.763.000   | 312.888.983     | (2.920.874.017)   | 9,68   |
|                                              | JUMLAH                                                                               | 612.332.377.000 | 230.026.267.820 | (382.306.109.180) | 37,57  |
|                                              |                                                                                      |                 |                 |                   |        |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN                       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                         | 109.162.670.000 | 19.054.337.777  | (90.108.332.223)  | 17,45  |
| PARIWISATA                                   | DINAS PARIWISATA                                                                     | 49.641.000.000  | 14.789.948.474  | (34.851.051.526)  | 29,79  |
| PERTANIAN                                    | DINAS PERTANIAN                                                                      | 119.095.000.000 | 35.805.473.720  | (83.289.526.280)  | 30,06  |
| KEHUTANAN                                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                 | 11.169.448.000  | 2.238.633.667   | (8.930.814.333)   | 20,04  |
| ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL               | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                 | 44.158.000.000  | 10.927.174.441  | (33.230.825.559)  | 24,75  |
| PERDAGANGAN                                  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                  | 9.268.315.600   | 2.240.299.100   | (7.028.016.500)   | 24,17  |
| PERINDUSTRIAN                                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                  | 81.022.684.400  | 14.537.254.281  | (66.485.430.119)  | 17,94  |
|                                              | JUMLAH                                                                               | 423.517.118.000 | 99.593.121.460  | (323.923.996.540) | 23,52  |
|                                              |                                                                                      |                 |                 |                   |        |
| SEKRETARIAT DAERAH                           | SEKRETARIAT DAERAH                                                                   | 259.793.000.000 | 95.948.946.106  | (163.844.053.894) | 36,93  |
| SEKRETARIAT DPRD                             | SEKRETARIAT DPRD                                                                     | 488.912.000.000 | 204.415.626.782 | (284.496.373.218) | 41,81  |



| BIDANG URUSAN               | OPD                                        | ANGGARAN           | REALISASI         | LEBIH/ (KURANG)     | PERSEN |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                             | JUMLAH                                     | 748.705.000.000    | 300.364.572.888   | (448.340.427.112)   | 40,12  |
|                             |                                            |                    |                   |                     |        |
| PERENCANAAN                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 50.911.000.000     | 19.285.243.771    | (31.625.756.229)    | 37,88  |
| KEUANGAN                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | 310.815.000.000    | 125.956.292.151   | (184.858.707.849)   | 40,52  |
|                             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3.206.997.052.647  | 1.896.497.011.931 | (1.310.500.040.716) | 59,14  |
| KEPEGAWAIAN                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   | 65.584.000.000     | 19.166.379.140    | (46.417.620.860)    | 29,22  |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA     | 53.982.000.000     | 19.180.463.051    | (34.801.536.949)    | 35,53  |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 3.550.000.000      | 750.828.225       | (2.799.171.775)     | 21,15  |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG      | BADAN PENGHUBUNG                           | 13.254.000.000     | 4.082.925.898     | (9.171.074.102)     | 30,81  |
|                             | JUMLAH                                     | 3.705.093.052.647  | 2.084.919.144.167 | (1.620.173.908.480) | 56,27  |
|                             |                                            |                    |                   |                     |        |
| INSPEKTORAT DAERAH          | INSPEKTORAT                                | 71.643.000.000     | 26.980.426.136    | (44.662.573.864)    | 37,66  |
|                             | JUMLAH                                     | 71.643.000.000     | 26.980.426.136    | (44.662.573.864)    | 37,66  |
|                             |                                            |                    |                   |                     |        |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          | 106.425.621.000    | 68.357.329.661    | (38.068.291.339)    | 64,23  |
|                             | JUMLAH                                     | 106.425.621.000    | 68.357.329.661    | (38.068.291.339)    | 64,23  |
|                             |                                            |                    |                   |                     |        |
|                             |                                            | 11.774.651.290.735 | 4.476.487.715.821 | (7.298.163.574.914) | 38,02  |

**Tabel.3.6**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program Triwulan II tahun 2023**

| PERANGKAT DAERAH                    | PROGRAM                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                 | SATUAN | TARGET | REALISASI  | Capaian |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                          | %      | 100,00 | 24,25      | 24,25   |
|                                     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil                                                                                               | %      | 100,00 | 55,10      | 55,10   |
|                                     | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus DasarKebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) | %      | 100,00 | 10,40      | 10,40   |
|                                     | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah                                                                    | %      | 100,00 | 84,59      | 84,59   |
|                                     | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Nilai IDI Pada poin hak-hak politik                                                                                               | %      | 100,00 | 1,43       | 1,43    |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                         | Persentase Penanganan Pra Bencana                                                                                                 | %      | 100,00 | 100,00     | 100,00  |
|                                     |                                                                                                                                        | Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana                                                                                  | %      | 100,00 | 100,00     | 100,00  |
|                                     |                                                                                                                                        | Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana                                                                        | %      | 100,00 | 100,00     | 100,00  |
|                                     |                                                                                                                                        | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal                                                    | %      | 100,00 | -          | 0,00    |
| Badan Pendapatan Daerah Daerah      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                  | Presentase Peningkatan Pajak Daerah                                                                                               | %      | 5,85   | -<br>51,57 |         |

| PERANGKAT DAERAH                        | PROGRAM                                                            | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                          | SATUAN           | TARGET | REALISASI | Capaian |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|---------|
|                                         |                                                                    | Presentase Peningkatan Retrebusi Daerah Dan Pendapatan Lain - Lain (%)                                                     | %                | 4,56   | - 60,24   |         |
| BADAN PENGHUBUNG                        | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                       | Cakupan Koordinasi Badan Penghubung terhadap Pemerintahan Daerah                                                           | Indeks           | 3,00   | 3,00      | 100,00  |
| BAPPEDA                                 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                               | Persen           | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                         |                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                        | Persen           | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                         |                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                     | Persen           | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                         | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | laporan /Dokumen | 5,00   | 3,00      | 60,00   |
|                                         |                                                                    | Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | laporan /Dokumen | 5,00   | 2,00      | 40,00   |
|                                         |                                                                    | Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Dokumen          | 5,00   | -         | 0,00    |
|                                         |                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                        | Persen           | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                         | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun n                                 | Persen           | 100,00 | 35,33     | 35,33   |
|                                         |                                                                    | Persentase dokumen perencanaan yang disahkan                                                                               | Persen           | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                         |                                                                    | Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan                                                                       | Persen           | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                         |                                                                    | Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah                                                | Persen           | 85,00  | 50,00     | 58,82   |
|                                         |                                                                    | Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD                                                                     | Persen           | 95,00  | 95,00     | 100,00  |
| Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                               | Persen           | 100,00 | 48,00     | 48,00   |
|                                         |                                                                    | Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan                                                                                  | Persen           | 100,00 | 48,00     | 48,00   |
| Biro Hukum Sekretariat Daerah           | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                            | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM                                                                                | %                | 100,00 | 50,00     | 50,00   |

| PERANGKAT DAERAH                                                   | PROGRAM                                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                         | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                                                    |                                                           | Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                       | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
|                                                                    |                                                           | Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                       | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
|                                                                    |                                                           | Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
| Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi                            | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (%)                                                                                     | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                                    |                                                           | Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (%)                                                                          | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
|                                                                    |                                                           | Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (%)                                                                      | %      | 100,00 | 70,00     | 70,00   |
|                                                                    |                                                           | Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja (%)                                                                                | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
| Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah                               | PROGAM KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                     | Cakupan realisasi Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                                                                                    | %      | 100,00 | 1,50      | 1,50    |
|                                                                    |                                                           | Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                              | %      | 100,00 | 1,00      | 1,00    |
|                                                                    |                                                           | Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                        | %      | 100,00 | 0,67      | 0,67    |
|                                                                    | PROGAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                    | Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan                                                                                   | %      | 100,00 | 1,33      | 1,33    |
|                                                                    |                                                           | Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan                                                                                     | %      | 100,00 | 1,33      | 1,33    |
|                                                                    |                                                           | Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah                                                                                             | %      | 100,00 | 1,00      | 1,00    |
| Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ                                                                                                        | Nilai  | 24,13  | -         | 0,00    |
|                                                                    |                                                           | Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                                                                              | Nilai  | 30,00  | -         | 0,00    |
|                                                                    |                                                           | Tingkat Kematangan UKPBJ                                                                                                                  | Nilai  | 26,67  | -         | 0,00    |
| Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                | Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Sebagai Bahan Evaluasi                             | %      | 100,00 | 12,75     | 12,75   |
|                                                                    |                                                           | Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan                                                                       | %      | 100,00 | 10,77     | 10,77   |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM                                               | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                       | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang di Implementasikan                                                                      | %      | 100,00 | 23,53     | 23,53   |
| Biro Umum        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | persentase capaian tata kelola keuangan dan aset setda                                                                                                  | %      | 100,00 | 40,00     | 40,00   |
| BPKAD            | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH               | Capaian Database Aset Provinsi Banten                                                                                                                   | Persen | 23,50  | 12,93     | 55,00   |
|                  |                                                       | Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten                                                                                                                 | Persen | 25,00  | 5,33      | 21,33   |
|                  |                                                       | Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten                                                                                                                | Persen | 16,50  | 1,32      | 8,00    |
|                  |                                                       | Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten                                                                                                             | Persen | 22,00  | 6,63      | 30,16   |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                   | Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                | Persen | 100,00 | 0,67      | 0,67    |
|                  |                                                       | Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah                                                                                        | Persen | 100,00 | 28,57     | 28,57   |
|                  |                                                       | Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel                                                                        | Persen | 100,00 | 11,83     | 11,83   |
|                  |                                                       | Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien                                                                                          | Persen | 100,00 | 17,00     | 17,00   |
| BPSDM            | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA              | Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi                                                                                            | %      | 75,00  | 30,00     | 40,00   |
|                  |                                                       | Presentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi                                      | %      | 100,00 | 20,00     | 20,00   |
|                  |                                                       | Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikas                                                                                         | %      | 100,00 | 30,00     | 30,00   |
|                  |                                                       | Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan, serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL | %      | 75,00  | 30,00     | 40,00   |
|                  |                                                       | Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif,                                                                                          | %      | 75,00  | 30,00     | 40,00   |

| PERANGKAT DAERAH                                     | PROGRAM                                                     | INDIKATOR PROGRAM                                                                                    | SATUAN      | TARGET     | REALISASI | Capaian |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                                                      |                                                             | dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL                                  |             |            |           |         |
| Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten | PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                               | Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%) | %           | 17,86      | 8,80      | 49,26   |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                       | Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)         | %           | 56,52      | 45,63     | 80,73   |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                       | Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)       | %           | 17.000,00  | -         | 0,00    |
|                                                      |                                                             | Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)                                             | %           | 77,17      | 78,42     | 101,62  |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                    | Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)                | %           | 45,40      | 34,66     | 76,34   |
| Dinas Kelautan dan Perikanan                         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       | Luas Laut yang terawasi                                                                              | Mil Persegi | 500,00     | 255,00    | 51,00   |
|                                                      |                                                             | Pelaku usaha perikanan yang terawasi                                                                 | Unit Usaha  | 50,00      | 20,00     | 40,00   |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi                          | Hektar      | 2,00       | 1,00      | 50,00   |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      | Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani                                                | Unit Usaha  | 50,00      | 27,00     | 54,00   |
|                                                      |                                                             | Produksi Perikanan Budidaya                                                                          | Ton         | 111.563,00 | 49.170,41 | 44,07   |
|                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       | Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan                                                        | Rekom       | 75,00      | 50,00     | 66,67   |
|                                                      |                                                             | Produksi Perikanan Tangkap                                                                           | Ton         | 75.632,25  | 32.501,45 | 42,97   |
|                                                      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            | Hasil uji mutu perikanan                                                                             | Sampel      | 250,00     | 130,00    | 52,00   |
|                                                      |                                                             | Sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan                                                 | Sertifikat  | 150,00     | 270,00    | 180,00  |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten        | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                | Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga                                                          | %           | 21,93      | 32,45     | 147,97  |
|                                                      |                                                             | Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga                                                           | %           | 42,00      | 51,66     | 123,00  |
|                                                      |                                                             | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga                                  | %           | 3,02       | -         | 0,00    |
|                                                      |                                                             | Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional                                    | %           | 10,00      | -         | 0,00    |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM                                                                    | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                 | SATUAN              | TARGET | REALISASI | Capaian |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|
|                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                       | Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan                                                               | %                   | 14,66  | 12,82     | 87,45   |
|                  |                                                                            | Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan                                                                                     | %                   | 25,00  | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                 | Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan                                                                             | %                   | 81,97  | -         | 0,00    |
| Dinas Kesehatan  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                           | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                          | Kelompok Masyarakat | 13,00  | 13,00     | 100,00  |
|                  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYAAKAT | Cakupan Kualitas Keluarga Sehat                                                                                                   | %                   | 57,00  | 53,48     | 93,82   |
|                  |                                                                            | Jumlah Parameter Laboratorium Kesehatan dan Laburatorium Kalibrasi yang Terakreditasi pada UPTD Labkesda                          | Parameter           | 118,00 | 137,00    | 116,10  |
|                  |                                                                            | Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi yang Bermutu                                                                    | Unit                | 239,00 | 239,00    | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin                                                                     | %                   | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)                                                                | %                   | 86,00  | 86,00     | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar | %                   | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa                              | %                   | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi       | %                   | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                  |                                                                            | Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan                                                                         | %                   | 100,00 | 44,00     | 44,00   |
|                  |                                                                            | Persentase RS Rujukan yang Terakreditasi                                                                                          | %                   | 79,20  | 100,00    | 126,26  |
|                  |                                                                            | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan                                                                                            | Rasio               | 0,13   | 0,12      | 92,31   |

| PERANGKAT DAERAH                                                        | PROGRAM                                                                        | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                              | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                    | Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan                                                                         | Orang  | 470,00 | 470,00    | 100,00  |
|                                                                         |                                                                                | Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan                                                                              | Orang  | 300,00 | 160,00    | 53,33   |
|                                                                         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan                                                                | %      | 100,00 | 89,00     | 89,00   |
|                                                                         |                                                                                | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT                                                                     | %      | 100,00 | 76,00     | 76,00   |
| Dinas Kesehatan (RSUD Malimping)                                        | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT    | Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping                                                          | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                                         |                                                                                | Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping                                                      | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                                         |                                                                                | Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping                                                            | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
| Dinas Ketahanan Pangan                                                  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                            | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                                                                      | %      | 22,22  | -         | 0,00    |
|                                                                         | PROGRAM PENGAWASAAN KEMANAAN PANGAN                                            | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan                                                                       | %      | 25,00  | 6,50      | 26,00   |
|                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                     | %      | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                                         | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT                     | Skor Pola Pangan Harapan                                                                                                                                       | %      | 85,00  | -         | 0,00    |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                       | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi                                                                                  | %      | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                                         |                                                                                | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | %      | 90,91  | 90,91     | 100,00  |
|                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                            | Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF                                                                                                                 | %      | 39,39  | -         | 0,00    |
|                                                                         |                                                                                | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah                                                   | %      | 100,00 | -         | 0,00    |



| PERANGKAT DAERAH                        | PROGRAM                                                                     | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                     | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI               | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                                                                                                 | %      | 54,60  | -         | 0,00    |
|                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                  | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | %      | 100,00 | -         | 0,00    |
| Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                              | Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian                                                                                       | %      | 25,00  | 16,96     | 67,83   |
|                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)    | Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat                                                                                        | %      | 25,00  | 7,60      | 30,42   |
|                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                | Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)                     | %      | 100,00 | 40,00     | 40,00   |
|                                         | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                 | Persentase Koperasi Aktif                                                                                                             | %      | 25,00  | 12,75     | 51,00   |
|                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                   | Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)                   | %      | 5,00   | 1,88      | 37,58   |
| Dinas Kesehatan (RSUD BANTEN)           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai rs pendidikan                                                                 | %      | 100,00 | 85,00     | 85,00   |
|                                         |                                                                             | Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai rs pendidikan                                                                       | %      | 100,00 | 85,00     | 85,00   |
|                                         |                                                                             | Persentase standar bagian pelayanan sebagai rs pendidikan                                                                             | %      | 100,00 | 85,00     | 85,00   |
|                                         |                                                                             | Persentase standar bagian penunjang sebagai rs pendidikan                                                                             | %      | 50,00  | 48,00     | 96,00   |
|                                         |                                                                             | Persentase standar bagian penunjang logistik sebagai rs pendidikan                                                                    | %      | 50,00  | 48,00     | 96,00   |
|                                         |                                                                             | Persentase standar bagian penunjang Rekam medis dan SIM RS sebagai rs pendidikan                                                      | %      | 50,00  | 48,00     | 96,00   |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN    | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                 | 1.Persentase Pengelolaan TAHURA Banten                                                                                                | Persen | 100,00 | 7,00      | 7,00    |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                  | SATUAN   | TARGET   | REALISASI | Capaian |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
|                  |                                                                                                                         | 2.Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang              | Kelompok | 6,00     | -         | 0,00    |
|                  |                                                                                                                         | 3.Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon        | Kelompok | 6,00     | -         | 0,00    |
|                  |                                                                                                                         | 4.Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun                                    | Persen   | 21,43    | 16,07     | 75,01   |
|                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1.Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup                   | Persen   | 80,00    | 29,04     | 36,30   |
|                  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 1.Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti                                                                | Persen   | 100,00   | 50,00     | 50,00   |
|                  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                             | 1.Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun                        | Kelompok | 42,00    | 21,00     | 50,00   |
|                  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | 1.Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Persen   | 11,76    | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | 1.Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun                                                                   | Persen   | 20,00    | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                               | 1.Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan                                                          | Persen   | 25,00    | -         | 0,00    |
|                  |                                                                                                                         | 2.Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang                  | Ha       | 2.500,00 | 225,00    | 9,00    |
|                  |                                                                                                                         | 3.Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon    | Ha       | 2.500,00 | 7,50      | 0,30    |
|                  |                                                                                                                         | 4.Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat              | Persen   | 90,00    | 37,63     | 41,81   |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI                                                                               | 1.Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                         | Persen   | 14,29    | 8,91      | 62,35   |

| PERANGKAT DAERAH                        | PROGRAM                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM                                                                                            | SATUAN            | TARGET       | REALISASI | Capaian |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------|
|                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                          | 1.Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi                                                    | Persen            | 100,00       | 50,00     | 50,00   |
|                                         | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 1.Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3                                                        | Persen            | 100,00       | 50,00     | 50,00   |
|                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | 1.Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persen            | 51,00        | 38,20     | 74,90   |
|                                         |                                                                                                          | 2.Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan                                                      | Persen            | 21,00        | 9,00      | 42,86   |
|                                         | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                    | 1.Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                          | Lembaga/Kab .kota | 68,00        | 68,00     | 100,00  |
|                                         | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT               | 1.Prosentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup     | Persen            | 100,00       | -         | 0,00    |
|                                         | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     | 1.Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas                                                 | Persen            | 100,00       | 33,45     | 33,45   |
| Dinas Pariwisata Provinsi Banten        | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                             | Prosentase Jumlah Promosi Wisata                                                                             | %                 | 100,00       | 27,78     | 27,78   |
|                                         |                                                                                                          | Prosentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                                                      | %                 | 5,00         | 4,00      | 80,00   |
|                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL       | Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan                                                                              | Rp                | 4.327.965,00 | -         | 0,00    |
|                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                          | Prosentase SDM yang Memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif                           | %                 | 100,00       | 43,25     | 43,25   |
|                                         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                      | Prosentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata                                                        | %                 | 100,00       | 40,00     | 40,00   |
|                                         |                                                                                                          | Rata – rata Lama Inap                                                                                        | Hari              | 1,66         | 1,63      | 98,19   |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                              | Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi             | %                 | 63,64        | 2,59      | 4,07    |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM                                                          | INDIKATOR PROGRAM                                                                             | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi                                              | %      | 85,71  | 13,35     | 15,57   |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung                                                  | %      | 1,61   | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota  | %      | 9,01   | 0,14      | 1,54    |
|                  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                              | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik                                                | %      | 63,10  | 0,49      | 0,77    |
|                  |                                                                  | Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Cidurian-Cisadane       | %      | 100,00 | 25,21     | 25,21   |
|                  |                                                                  | Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Ciliman-Cisawarna       | %      | 100,00 | 37,19     | 37,19   |
|                  |                                                                  | Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Ciujung-Cidanau         | %      | 100,00 | 18,96     | 18,96   |
|                  |                                                                  | Persentase penanganan abrasi                                                                  | %      | 74,39  | 7,97      | 10,71   |
|                  |                                                                  | Persentase penanganan banjir                                                                  | %      | 43,20  | 4,47      | 10,34   |
|                  |                                                                  | Persentase penanganan situ/embung                                                             | %      | 0,73   | 0,00      | 0,13    |
|                  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Persentase Layanan Pengujian Bahan dan Konstruksi Bangunan                                    | %      | 142,70 | 26,01     | 18,23   |
|                  |                                                                  | Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi                                                   | %      | 21,69  | 5,24      | 24,15   |
|                  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                  | Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | %      | 16,67  | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional                                             | %      | 0,26   | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                                                | %      | 94,00  | 14,62     | 15,55   |
|                  |                                                                  | Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | %      | 83,13  | 8,06      | 9,70    |
|                  |                                                                  | Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                                             | %      | 95,00  | 19,24     | 20,25   |
|                  |                                                                  | Persentase Penyelesaian Jalan Baru                                                            | %      | 16,00  | 3,90      | 24,38   |
|                  |                                                                  | Persentase penyelesaian simpang tidak sebidang                                                | %      | 25,00  | -         | 0,00    |
|                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                           | Persentase Ketidak Sesuaian Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana tata Ruang                | %      | 71,00  | 7,70      | 10,85   |
|                  |                                                                  | Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang                                                | %      | 20,00  | 0,70      | 3,49    |

| PERANGKAT DAERAH                                                                   | PROGRAM                                                                             | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                            | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                                                                    |                                                                                     | Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                     | %      | 100,00 | 22,07     | 22,07   |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang                                 | %      | 6,32   | 3,16      | 50,00   |
|                                                                                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang | Desa   | 69,00  | 34,50     | 50,00   |
|                                                                                    | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa                                                 | Desa   | 68,00  | 34,00     | 50,00   |
|                                                                                    | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                  | Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi                                                     | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA [KS]                        | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun ( Specific Fertility Rate/ASFR                                                                       | Nilai  | 10,00  | 18,00     | 180,00  |
|                                                                                    | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA [KB]                                           | Angka prevalensi kontrasepsi moden / Modern Contraceptive (mCPR)                                                                             | %      | 60,91  | 57,40     | 94,24   |
|                                                                                    | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK                                                          | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA                                                                                                              | Indeks | 72,51  | 59,13     | 81,55   |
|                                                                                    | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                            | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 –17 tahun                                                                      | %      | 98,00  | 95,23     | 97,17   |
|                                                                                    |                                                                                     | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian                                                                 | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                                                    |                                                                                     | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai                                                       | %      | 100,00 | 30,14     | 30,14   |
|                                                                                    | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                        | Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk                                                                                              | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                                                    | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD                                                                               | %      | 7,50   | 12,40     | 165,33  |
|                                                                                    |                                                                                     | Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen                                                                                                | %      | 17,65  | 17,65     | 100,00  |
|                                                                                    |                                                                                     | Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi                                                                                   | %      | 36,13  | 46,43     | 128,51  |
|                                                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                             | Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan                                                  | %      | 19,51  | 14,63     | 74,99   |

| PERANGKAT DAERAH                                       | PROGRAM                                                       | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                                    | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                       | Ketersediaan Profil kependudukan                                                                                                                                     | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK               | Pesentase Pengelolaan Sistem Data Gender                                                                                                                             | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                 | Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun                                                                                                        | Tahun  | 22,10  | 20,09     | 90,90   |
|                                                        | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                         | Presentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga                                                                                        | %      | 27,27  | 23,63     | 86,65   |
|                                                        | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                              | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                                                                                               | Indeks | 84,36  | 79,32     | 94,03   |
|                                                        |                                                               | Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu      | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                        | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                | Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan                                                                                                               | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                                        |                                                               | Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK                                                                                                  | %      | 85,00  | 100,00    | 117,65  |
|                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                                                     | %      | 25,00  | 9,88      | 39,52   |
|                                                        | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    | Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti                                                                                                | %      | 45,45  | 31,82     | 70,01   |
|                                                        |                                                               | Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal                                                                                 | %      | 25,00  | -         | 0,00    |
|                                                        | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal                                                                                                    | %      | 25,00  | 6,02      | 24,09   |
|                                                        | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               | Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal                                                                                                                        | %      | 25,00  | 15,78     | 63,12   |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten        | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA              | Presentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola.                                                                                                              | Persen | 65,00  | -         | 0,00    |
|                                                        | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                      | Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran                                                                                                           | Persen | 74,00  | -         | 0,00    |

| PERANGKAT DAERAH  | PROGRAM                                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                                            | SATUAN  | TARGET      | REALISASI   | Capaian |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|
|                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat                                      | Persen  | 79,84       | 59,54       | 74,57   |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat                                      | Persen  | 60,18       | 75,49       | 125,44  |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak                             | Persen  | 52,60       | 51,59       | 98,08   |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang                        | Persen  | 59,30       | 2,44        | 4,12    |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon | Persen  | 72,64       | 70,45       | 96,99   |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang                         | Persen  | 70,89       | 67,77       | 95,60   |
|                   |                                                           | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang           | Persen  | 78,05       | 79,78       | 102,22  |
|                   |                                                           | Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan                                           | Persen  | 25,00       | -           | 0,00    |
|                   |                                                           | Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                       | Kinerja | baik        | baik        | 100,00  |
|                   |                                                           | Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan           | Persen  | 19,72       | -           | 0,00    |
|                   |                                                           | Presentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B                                    | Persen  | 76,00       | 73,00       | 96,05   |
|                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                           | Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi                               | Persen  | 20,00       | 61,27       | 306,35  |
|                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                           | Kualitas pengembangan kebudayaan                                                             | Kinerja | sangat baik | sangat baik | 100,00  |
|                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                            | Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus               | Persen  | 51,90       | -           | 0,00    |
|                   |                                                           | Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah             | Persen  | 77,44       | -           | 0,00    |
|                   | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                 | Persentase sekolah yang mendapatkan izin                                                     | Persen  | 100,00      | -           | 0,00    |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi                              | %       | 50,00       | 31,27       | 62,54   |
|                   |                                                           | Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan                               | %       | 15,00       | 6,64        | 44,29   |
|                   |                                                           | Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal                                               | %       | 20,00       | 10,00       | 50,00   |
|                   |                                                           | Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPT Pengelola Prasarana Perhubungan)         | %       | 10,00       | 4,01        | 40,12   |

| PERANGKAT DAERAH                    | PROGRAM                                                 | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                     |                                                         | Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | 100,00 | 40,00     | 40,00   |
|                                     |                                                         | Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 20,00  | 11,43     | 57,14   |
|                                     |                                                         | Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 50,00  | 38,46     | 76,92   |
|                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                      | Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 100,00 | 39,41     | 39,41   |
|                                     |                                                         | Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 50,00  | 13,51     | 27,01   |
|                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                           | Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 100,00 | 2,05      | 2,05    |
|                                     |                                                         | Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (UPT Pengelola Prasarana Perhubungan)                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 100,00 | 49,87     | 49,87   |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota                                                                                                       | %      | 55,00  | 75,00     | 136,36  |
|                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                             | Pertumbuhan nilai ekspor non migas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 5,00   | -         |         |
|                                     | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                | Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                     | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI    | Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 20,00  | 50,00     | 250,00  |
|                                     | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN       | Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 6,39   | -         | 0,00    |
|                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                       | %      | 100,00 | 50,00     | 50,00   |
|                                     | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI            | Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 0,22   | 0,73      | 330,28  |
|                                     | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (UPT PTSI) | Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 55,00  | 100,00    | 181,82  |
|                                     | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN            | Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 40,00  | 100,00    | 250,00  |



| PERANGKAT DAERAH                                 | PROGRAM                                                                 | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                 | SATUAN       | TARGET | REALISASI | Capaian |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|
|                                                  | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok                                                                | %            | 5,00   | 3,65      | 73,00   |
|                                                  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani                                                | %            | 50,00  | -         | 0,00    |
|                                                  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPT PSMB)              | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku                                                | %            | 10,00  | -         | 0,00    |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                          | Indikator Program A<br>Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                    | %            | 1,00   | 0,54      | 54,00   |
|                                                  |                                                                         | Indikator Program B<br>Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah                       | %            | 20,00  | 139,36    | 696,80  |
|                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                               | Indikator Program A<br>Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi         | %            | 20,00  | 10,00     | 50,00   |
|                                                  |                                                                         | Indikator Program B<br>Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | %            | 20,00  | 25,93     | 129,65  |
|                                                  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                             | Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media                                                              | %            | 20,00  | 3,02      | 15,10   |
| Dinas Pertanian                                  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)                                         | %            | 95,00  | 95,00     | 100,00  |
|                                                  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Unit Usaha)                                                              | Unit Usaha   | 37,00  | 29,00     | 78,38   |
|                                                  |                                                                         | Penurunan Jumlah kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah Kasus)                            | Jumlah Kasus | 22,00  | 13,00     | 59,09   |
|                                                  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Peningkatan Infrastruktur Pertanian (KM)                                                                          | KM           | 28,40  | -         | 0,00    |
|                                                  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (sertifikat)                                                                 | Sertifikat   | 409,00 | 179,00    | 43,77   |
|                                                  |                                                                         | Peningkatan Produktivitas Daging domba (kg/ekor)                                                                  | kg/ekor      | 12,95  | 12,56     | 97,00   |
|                                                  |                                                                         | Peningkatan Produktivitas Daging kambing (kg/ekor)                                                                | kg/ekor      | 12,84  | 11,60     | 90,37   |

| PERANGKAT DAERAH                                              | PROGRAM                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM                                                                            | SATUAN        | TARGET | REALISASI | Capaian |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Daging kerbau (kg/ekor)                                            | kg/ekor       | 145,88 | 128,87    | 88,34   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Daging sapi (kg/ekor)                                              | kg/ekor       | 230,06 | 216,05    | 93,91   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas aren (Ton/ha)                                                      | Ton/ha        | 2,95   | 2,70      | 91,64   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas cabai (Ton/ha)                                                     | Ton/ha        | 8,75   | 7,89      | 90,15   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Durian (Kg/pohon)                                                  | Kg/pohon      | 7,91   | 7,67      | 97,00   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Jagung (Kw/Ha)                                                     | Kw/Ha         | 4,22   | 3,92      | 93,00   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah (Kw/Ha)                                               | Kw/Ha         | 1,24   | 1,18      | 95,00   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas kelapa (Ton/ha)                                                    | Ton/ha        | 0,77   | 0,69      | 89,57   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Padi (Kw/Ha)                                                       | Kw/Ha         | 5,20   | 5,04      | 97,00   |
|                                                               |                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas Pisang (Kg/rumpun)                                                 | Kg/rumpun     | 3,38   | 3,14      | 92,79   |
|                                                               |                                                                                                                             | Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu (ekor)                                            | ekor          | 339,00 | 145,00    | 42,77   |
|                                                               | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama (kelompok tani)                   | Kelompok Tani | 276,00 | 266,00    | 96,38   |
|                                                               | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                           | Rekomendasi izin usaha pertanian (sertifikat)                                                | Sertifikat    | 229,00 | 89,00     | 38,86   |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  | Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani                                                          | Ha            | 219,00 | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                  | Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota                    | %             | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                              | Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu                    | %             | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                              | Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi                                    | %             | 43,50  | -         | 0,00    |
|                                                               |                                                                                                                             | Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi                                         | %             | 25,00  | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah             | %             | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               | Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman                    | %             | 91,73  | -         | 0,00    |
|                                                               | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                   | Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee | %             | 100,00 | -         | 0,00    |
| Dinas Sosial                                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                 | Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial                       | Persen (%)    | 100,00 | 39,36     | 39,36   |

| PERANGKAT DAERAH                                    | PROGRAM                                                        | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                      | SATUAN     | TARGET | REALISASI | Capaian |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|
|                                                     | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi | Persen (%) | 100,00 | 70,73     | 70,73   |
|                                                     | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota                                                               | Persen (%) | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        | Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial                                                                                             | Persen (%) | 100,00 | 16,96     | 16,96   |
|                                                     |                                                                | Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS                                                                                                   | Persen (%) | 100,00 | 5,60      | 5,60    |
|                                                     |                                                                | Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                                                                               | Persen (%) | 100,00 | 2,25      | 2,25    |
|                                                     |                                                                | Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                 | Persen (%) | 100,00 | -         | 0,00    |
|                                                     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial                                                                                                   | Persen (%) | 100,00 | 22,08     | 22,08   |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                               | Persentase Perencanaan Tenaga Kerja                                                                                                                    | %          | 8,70   | 6,95      | 79,89   |
|                                                     | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA         | Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja                                                                                                              | %          | 6,64   | 2,27      | 34,19   |
|                                                     |                                                                | Persentase Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                  | %          | 4,96   | 4,36      | 87,90   |
|                                                     | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                | Persentase Kesempatan Kerja                                                                                                                            | %          | 13,61  | 11,40     | 83,76   |
|                                                     | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                             | Persentase Kondisi Lingkungan Kerja                                                                                                                    | %          | 3,53   | 0,90      | 25,50   |
|                                                     | ROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                     | Persentase Hubungan Industrial                                                                                                                         | %          | 4,19   | 2,40      | 57,28   |
|                                                     |                                                                | Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                                                 | %          | 10,00  | 10,00     | 100,00  |
|                                                     |                                                                | Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja                                                                                                        | %          | 10,00  | 10,00     | 100,00  |
| Inspektorat Daerah Provinsi Banten                  | PROGRAM PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                             | Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                                                | %          | 100,00 | 70,59     | 70,59   |

| PERANGKAT DAERAH                           | PROGRAM                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                      | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                        | Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan                                                                     | %      | 100,00 | 41,86     | 41,86   |
|                                            |                                                                                           | Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti                                                                     | %      | 80,00  | 82,00     | 102,50  |
| Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Koordinasi dan Penanganan Bencana Kebakaran                                                                    | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                            | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi                                                     | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                            |                                                                                           | Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Trantibum          | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
|                                            |                                                                                           | Persentase Penegakan Perda Perkada                                                                                     | %      | 100,00 | 100,00    | 100,00  |
| Sekretariat DPRD                           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                        | Capaian Kinerja Fungsi DPRD                                                                                            | Persen | 100,00 | 31,48     | 31,48   |
|                                            |                                                                                           | Capaian Prosentase Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD | Persen | 100,00 | 34,55     | 34,55   |
| Semua Perangkat Daerah                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               | %      | 100,00 | 45,80     | 45,80   |
| Total C                                    |                                                                                           |                                                                                                                        |        |        |           |         |

Tabel 3.7  
Realisasi Capaian Anggaran Per Program Triwulan II Tahun 2023

| Urusan / Bidang Urusan / Program                                |   |                                                                                           | Anggaran          | Realisasi         |       |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                 |   |                                                                                           |                   | Rp                | (%)   |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                                                                           | 6.106.935.122.088 | 1.666.246.853.688 | 27,28 |
|                                                                 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      | 1.155.420.581.657 | 390.943.111.377   | 33,84 |
|                                                                 | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                          | 3.117.082.500     | 1.160.614.750     | 37,23 |
|                                                                 | - | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT               | 543.026.669.853   | 213.164.147.850   | 39,25 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                               | 77.138.856.700    | 12.499.637.597    | 16,20 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 531.302.032.604   | 163.820.447.180   | 30,83 |
|                                                                 | - | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                               | 835.940.000       | 298.264.000       | 35,68 |
|                                                                 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 92.190.000.000    | 32.425.223.110    | 35,17 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | 17.463.344.000    | 4.699.314.853     | 26,91 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 7.775.000.000     | 456.900.000       | 5,88  |
|                                                                 | - | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 7.752.396.000     | 1.644.122.040     | 21,21 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 59.199.260.000    | 25.624.886.217    | 43,29 |
|                                                                 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 1.105.636.866.000 | 123.773.189.194   | 11,19 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                               | 124.880.150.000   | 5.084.305.893     | 4,07  |
|                                                                 | - | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                          | 63.750.000.000    | 9.926.163.809     | 15,57 |
|                                                                 | - | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                    | 450.000.000       | -                 | -     |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                                                                             | Anggaran          | Realisasi         |       |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                  |   |                                                                                                                             |                   | Rp                | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                            | 46.070.000.000    | 711.706.941       | 1,54  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                   | 128.756.359.291   | 20.770.452.192    | 16,13 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                        | 5.435.407.600     | 708.372.140       | 13,03 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                             | 4.500.000.000     | -                 | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                            | 2.830.000.000     | -                 | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                       | 127.741.779.660   | 51.740.336.450    | 40,50 |
|                                  | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                               | 597.473.169.449   | 34.360.576.035    | 5,75  |
|                                  | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                      | 3.750.000.000     | 471.275.734       | 12,57 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                                       | 3.120.447.674.431 | 1.077.151.935.128 | 34,52 |
|                                  | - | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                    | 109.520.000.000   | 25.659.000.000    | 23,43 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                              | 1.689.309.853.572 | 569.018.193.995   | 33,68 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                              | 3.800.000.000     | 329.600.000       | 8,67  |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                   | 200.000.000       | -                 | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                       | 1.317.617.820.859 | 482.145.141.133   | 36,59 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                 | 520.712.000.000   | 12.144.704.687    | 2,33  |
|                                  | - | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  | 80.798.000.000    | 860.336.800       | 1,06  |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                              | 21.500.000.000    | 444.849.384       | 2,07  |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 500.000.000       | -                 | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               | 379.526.950.000   | 983.979.513       | 0,26  |

| Urusan / Bidang Urusan / Program                                      |   |                                                                           | Anggaran        | Realisasi       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                                                       |   |                                                                           |                 | Rp              | (%)   |
|                                                                       | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | 38.387.050.000  | 9.855.538.990   | 25,67 |
|                                                                       |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                         | 112.528.000.000 | 29.808.690.192  | 26,49 |
|                                                                       | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                               | 1.949.750.000   | 767.389.225     | 39,36 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                | 1.199.863.800   | 677.690.958     | 56,48 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN            | 75.000.000      | -               | -     |
|                                                                       | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | 46.815.389.700  | 16.876.497.309  | 36,05 |
|                                                                       | - | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                   | 53.054.802.500  | 9.459.398.700   | 17,83 |
|                                                                       | - | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                               | 9.433.194.000   | 2.027.714.000   | 21,50 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                                                           | 612.332.377.000 | 230.026.267.820 | 37,57 |
|                                                                       |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.264.915.000   | 800.537.379     | 35,35 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                  | 750.000.000     | 154.756.702     | 20,63 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                              | 850.000.000     | 501.753.202     | 59,03 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                   | 560.000.000     | 106.168.256     | 18,96 |
|                                                                       | - | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                   | 104.915.000     | 37.859.219      | 36,09 |
|                                                                       |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                      | 3.233.763.000   | 312.888.983     | 9,68  |
|                                                                       | - | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                 | 2.233.915.000   | 281.432.983     | 12,60 |
|                                                                       | - | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                               | 999.848.000     | 31.456.000      | 3,15  |
|                                                                       |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                     | 7.450.000.000   | 1.579.380.357   | 21,20 |
|                                                                       | - | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                          | 1.650.000.000   | 87.527.050      | 5,30  |
|                                                                       | - | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                           | 1.280.000.000   | 109.173.800     | 8,53  |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                          | Anggaran       | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                          |                | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                          | 4.100.000.000  | 1.240.477.890  | 30,26 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 420.000.000    | 142.201.617    | 33,86 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                       | 89.008.000.000 | 38.659.063.336 | 43,43 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                             | 61.024.245.600 | 28.061.548.945 | 45,98 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     | 5.200.000.000  | 952.224.968    | 18,31 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                               | 1.581.902.250  | 1.030.460.834  | 65,14 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 21.201.852.150 | 8.614.828.589  | 40,63 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    | 65.000.178.900 | 22.966.472.870 | 35,33 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 | 28.509.955.389 | 8.716.884.732  | 30,57 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                      | 12.686.573.000 | 5.589.767.200  | 44,06 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 23.803.650.511 | 8.659.820.938  | 36,38 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH           | 27.394.781.000 | 10.467.972.419 | 38,21 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 1.310.474.100  | 491.305.656    | 37,49 |
|                                  | - | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.892.154.000  | 804.908.811    | 27,83 |
|                                  | - | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 584.160.000    | 231.435.550    | 39,62 |
|                                  | - | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 3.499.874.000  | 1.331.734.541  | 38,05 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | 1.073.763.000  | 347.249.127    | 32,34 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 18.034.355.900 | 7.261.338.734  | 40,26 |



| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                                                                         | Anggaran       | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                                                                         |                | Rp             | (%)   |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             | 66.490.552.000 | 29.064.405.039 | 43,71 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 916.000.000    | 92.239.400     | 10,07 |
|                                  | - | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 468.000.000    | 107.348.400    | 22,94 |
|                                  | - | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | 384.546.000    | -              | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 551.000.000    | 49.083.900     | 8,91  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 7.819.445.000  | 5.723.458.600  | 73,20 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 128.419.200    | 60.090.000     | 46,79 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                   | 1.901.057.000  | 548.243.962    | 28,84 |
|                                  | - | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 735.000.000    | 331.323.985    | 45,08 |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 744.000.000    | 29.400.000     | 3,95  |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 52.068.584.800 | 21.979.452.181 | 42,21 |
|                                  | - | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 774.500.000    | 143.764.611    | 18,56 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                       | 50.389.000.000 | 9.450.435.229  | 18,75 |
|                                  | - | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                     | 1.700.000.000  | 24.135.000     | 1,42  |
|                                  | - | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      | 977.000.000    | 152.575.500    | 15,62 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                         | 1.320.000.000  | 32.918.000     | 2,49  |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                                     | Anggaran       | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                                     |                | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                   | 24.292.579.300 | 1.382.071.260  | 5,69  |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 22.099.420.700 | 7.858.735.469  | 35,56 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                         | 32.129.000.000 | 9.845.116.663  | 30,64 |
|                                  | - | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | 2.424.040.000  | 600.031.300    | 24,75 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 11.630.888.000 | 2.948.427.000  | 25,35 |
|                                  | - | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | 500.000.000    | 96.827.000     | 19,37 |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 | 1.535.000.000  | 57.252.000     | 3,73  |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 16.039.072.000 | 6.142.579.363  | 38,30 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK             | 36.237.885.000 | 16.372.297.772 | 45,18 |
|                                  | - | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                    | 880.000.000    | 168.847.930    | 19,19 |
|                                  | - | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           | 7.548.424.000  | 3.978.209.373  | 52,70 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                     | 200.000.000    | 42.249.000     | 21,12 |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                               | 2.494.955.000  | 1.010.785.513  | 40,51 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 21.545.590.000 | 9.773.300.802  | 45,36 |
|                                  | - | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                    | 1.251.728.000  | 310.086.569    | 24,77 |
|                                  | - | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                      | 2.317.188.000  | 1.088.818.585  | 46,99 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                          | 35.549.844.000 | 12.124.029.977 | 34,10 |
|                                  | - | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                   | 1.250.000.000  | 242.550.700    | 19,40 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                         | Anggaran       | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                         |                | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL           | 350.000.000    | 151.393.100    | 43,26 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                              | 5.920.000.000  | 913.587.611    | 15,43 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                        | 1.774.600.000  | 458.226.400    | 25,82 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | 21.477.000.000 | 9.109.628.366  | 42,42 |
|                                  | - | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                         | 4.778.244.000  | 1.248.643.800  | 26,13 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 6.883.400.000  | 3.108.160.078  | 45,15 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)            | 5.194.400.000  | 2.550.117.804  | 49,09 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                               | 1.124.000.000  | 504.996.574    | 44,93 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                           | 565.000.000    | 53.045.700     | 9,39  |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                  | 72.735.000.000 | 30.955.896.966 | 42,56 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                           | 1.580.000.000  | 275.351.000    | 17,43 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                      | 1.050.000.000  | 280.348.210    | 26,70 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | 38.355.695.000 | 16.448.621.509 | 42,88 |
|                                  | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)           | 31.749.305.000 | 13.951.576.247 | 43,94 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                 | 25.762.237.000 | 9.696.444.909  | 37,64 |
|                                  | - | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                          | 3.881.664.300  | 963.686.289    | 24,83 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | 21.880.572.700 | 8.732.758.620  | 39,91 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                   | 2.750.278.500  | 255.212.919    | 9,28  |
|                                  | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI           | 2.750.278.500  | 255.212.919    | 9,28  |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                   | 500.000.000    | -              | -     |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                                           | Anggaran        | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                                           |                 | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                | 200.000.000     | -              | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                            | 100.000.000     | -              | -     |
|                                  | - | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 200.000.000     | -              | -     |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                      | 1.055.542.600   | 277.462.200    | 26,29 |
|                                  | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                | 1.055.542.600   | 277.462.200    | 26,29 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   | 87.498.000.000  | 34.090.490.724 | 38,96 |
|                                  | - | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                               | 3.567.060.000   | 1.622.594.025  | 45,49 |
|                                  | - | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                    | 14.996.136.300  | 4.850.832.300  | 32,35 |
|                                  | - | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                           | 3.400.000.000   | 452.949.000    | 13,32 |
|                                  | - | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                        | 1.149.341.000   | 409.285.000    | 35,61 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 64.292.623.700  | 26.754.830.399 | 41,61 |
|                                  | - | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                          | 92.839.000      | -              | -     |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN      |   |                                                                                           | 423.517.118.000 | 99.593.121.460 | 23,52 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                 | 44.158.000.000  | 10.927.174.441 | 24,75 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                     | 2.340.000.000   | 83.578.949     | 3,57  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                                     | 606.695.000     | 15.921.000     | 2,62  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                     | 17.299.549.000  | 806.478.230    | 4,66  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                  | 579.237.000     | 188.481.530    | 32,54 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 23.332.519.000  | 9.832.714.732  | 42,14 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                      | 11.169.448.000  | 2.238.633.667  | 20,04 |
|                                  | - | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                               | 2.996.540.000   | 704.666.600    | 23,52 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                                                    | Anggaran        | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                                                    |                 | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN       | 703.650.000     | 175.748.000    | 24,98 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                     | 958.788.000     | 304.108.220    | 31,72 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                          | 6.510.470.000   | 1.054.110.847  | 16,19 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                  | 109.162.670.000 | 19.054.337.777 | 17,45 |
|                                  | - | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 700.000.000     | 60.174.000     | 8,60  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                        | 1.995.000.000   | 326.798.700    | 16,38 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                             | 8.937.286.000   | 155.401.400    | 1,74  |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                              | 35.565.006.200  | 270.660.100    | 0,76  |
|                                  | - | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                   | 1.613.405.900   | 292.779.600    | 18,15 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 60.351.971.900  | 17.948.523.977 | 29,74 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                              | 49.641.000.000  | 14.789.948.474 | 29,79 |
|                                  | - | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | 5.295.355.000   | 1.355.140.560  | 25,59 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 2.300.000.000   | 353.801.900    | 15,38 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 3.850.000.000   | 1.124.521.185  | 29,21 |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | 18.615.355.000  | 3.845.947.887  | 20,66 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 19.580.290.000  | 8.110.536.942  | 41,42 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                             | 9.268.315.600   | 2.240.299.100  | 24,17 |
|                                  | - | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                        | 1.100.000.000   | 448.763.788    | 40,80 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program |   |                                                                         | Anggaran        | Realisasi      |       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|                                  |   |                                                                         |                 | Rp             | (%)   |
|                                  | - | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | 710.000.000     | 124.648.088    | 17,56 |
|                                  | - | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       | 950.000.000     | 127.863.691    | 13,46 |
|                                  | - | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            | 460.000.000     | 89.057.971     | 19,36 |
|                                  | - | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING     | 2.200.000.000   | 666.478.948    | 30,29 |
|                                  | - | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | 3.848.315.600   | 783.486.614    | 20,36 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                | 81.022.684.400  | 14.537.254.281 | 17,94 |
|                                  | - | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                  | 300.000.000     | -              | -     |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                | 600.000.000     | 119.697.785    | 19,95 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | 73.862.291.400  | 13.248.984.018 | 17,94 |
|                                  | - | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                            | 6.260.393.000   | 1.168.572.478  | 18,67 |
|                                  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                    | 119.095.000.000 | 35.805.473.720 | 30,06 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 1.100.000.000   | 206.520.600    | 18,77 |
|                                  | - | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 3.373.542.000   | 902.770.874    | 26,76 |
|                                  | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | 66.635.086.500  | 27.136.892.905 | 40,72 |
|                                  | - | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 8.073.562.600   | 430.734.700    | 5,34  |
|                                  | - | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 32.295.008.900  | 4.473.946.341  | 13,85 |
|                                  | - | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | 7.367.800.000   | 2.597.758.300  | 35,26 |
|                                  | - | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | 250.000.000     | 56.850.000     | 22,74 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program    |   |                                                                                                                                        | Anggaran        | Realisasi       |       |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                     |   |                                                                                                                                        |                 | Rp              | (%)   |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM             |   |                                                                                                                                        | 106.425.621.000 | 68.357.329.661  | 64,23 |
|                                     |   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            | 106.425.621.000 | 68.357.329.661  | 64,23 |
|                                     | - | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 1.560.000.000   | 366.218.220     | 23,48 |
|                                     | - | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | 2.923.996.300   | 1.626.166.826   | 55,61 |
|                                     | - | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 6.212.583.055   | 654.970.000     | 10,54 |
|                                     | - | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 35.621.423.828  | 29.993.500.532  | 84,20 |
|                                     | - | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 38.172.070.000  | 28.436.709.000  | 74,50 |
|                                     | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 21.935.547.817  | 7.279.765.083   | 33,19 |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |   |                                                                                                                                        | 748.705.000.000 | 300.364.572.888 | 40,12 |
|                                     |   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                     | 259.793.000.000 | 95.948.946.106  | 36,93 |
|                                     | - | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                                | 3.265.727.200   | 863.010.200     | 26,43 |
|                                     | - | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                             | 1.000.000.000   | 55.510.990      | 5,55  |
|                                     | - | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                              | 1.950.224.285   | 738.903.079     | 37,89 |
|                                     | - | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                           | 19.480.000.000  | 12.296.428.028  | 63,12 |
|                                     | - | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                                | 3.350.000.000   | 727.490.695     | 21,72 |
|                                     | - | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                                            | 2.819.183.000   | 577.470.928     | 20,48 |
|                                     | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 226.736.795.264 | 80.535.904.436  | 35,52 |
|                                     | - | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                   | 1.191.070.251   | 154.227.750     | 12,95 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program     |   |                                                         | Anggaran          | Realisasi         |       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                      |   |                                                         |                   | Rp                | (%)   |
|                                      |   | SEKRETARIAT DPRD                                        | 488.912.000.000   | 204.415.626.782   | 41,81 |
|                                      | - | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD      | 248.784.775.000   | 111.027.360.470   | 44,63 |
|                                      | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 240.127.225.000   | 93.388.266.312    | 38,89 |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN |   |                                                         | 71.643.000.000    | 26.980.426.136    | 37,66 |
|                                      |   | INSPEKTORAT DAERAH                                      | 71.643.000.000    | 26.980.426.136    | 37,66 |
|                                      | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 62.868.778.000    | 26.114.087.586    | 41,54 |
|                                      | - | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      | 7.789.982.000     | 817.138.550       | 10,49 |
|                                      | - | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 984.240.000       | 49.200.000        | 5,00  |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                                                         | 3.705.093.052.647 | 2.084.919.144.167 | 56,27 |
|                                      |   | KEPEGAWAIAN                                             | 65.584.000.000    | 19.166.379.140    | 29,22 |
|                                      | - | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                              | 9.746.607.800     | 3.855.737.435     | 39,56 |
|                                      | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 55.837.392.200    | 15.310.641.705    | 27,42 |
|                                      |   | KEUANGAN                                                | 3.517.812.052.647 | 2.022.453.304.082 | 57,49 |
|                                      | - | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                 | 11.094.129.000    | 848.446.325       | 7,65  |
|                                      | - | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | 3.156.650.622.973 | 1.879.576.369.882 | 59,54 |
|                                      | - | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   | 23.068.622.652    | 4.838.432.025     | 20,97 |
|                                      | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 326.998.678.022   | 137.190.055.850   | 41,95 |
|                                      |   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                | 53.982.000.000    | 19.180.463.051    | 35,53 |
|                                      | - | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                | 19.842.919.400    | 4.347.229.438     | 21,91 |
|                                      | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 34.139.080.600    | 14.833.233.613    | 43,45 |



| Urusan / Bidang Urusan / Program |                             |                                                                    | Anggaran           | Realisasi         |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                                  |                             |                                                                    |                    | Rp                | (%)   |
|                                  | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                                                    | 3.550.000.000      | 750.828.225       | 21,15 |
|                                  |                             | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | 3.550.000.000      | 750.828.225       | 21,15 |
|                                  | PENGELOLAAN PENGHUBUNG      |                                                                    | 13.254.000.000     | 4.082.925.898     | 30,81 |
|                                  | -                           | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                       | 3.583.391.830      | 542.663.514       | 15,14 |
|                                  | -                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 9.670.608.170      | 3.540.262.384     | 36,61 |
|                                  | PERENCANAAN                 |                                                                    | 50.911.000.000     | 19.285.243.771    | 37,88 |
|                                  | -                           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.431.516.300      | 543.974.803       | 22,37 |
|                                  | -                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 40.079.483.800     | 16.821.503.708    | 41,97 |
|                                  | -                           | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 8.399.999.900      | 1.919.765.260     | 22,85 |
| Grand Total                      |                             |                                                                    | 11.774.651.290.735 | 4.476.487.715.821 | 38,02 |

## **BAB IV**

### **ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan II TA. 2023**

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang telah tercapai sebanyak 18 indikator dan sebanyak 15 indikator berprogress untuk mencapai target di akhir tahun.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2023 ini, sasaran daerah yang perlu penguatan adalah capaian makro daerah dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2023.

#### **4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II TA. 2023**

##### **A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 16 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak sisanya sebanyak 76 Indikator baru akan terhitung ketercapaiannya di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2023 adalah belanja yang mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan

penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka dalam mencapai sasaran PD, pengendalian kinerja PD dilakukan di semua level dan pinpinan perlu memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2023.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II tahun 2023 berdasarkan capaian keuangan, Pada APBD 2023 Provinsi Banten Belanja APBD sebesar Rp.11.774.651.290.753,- dan terealisasi sebesar Rp.4.476.487.715.821 atau 38,02%, dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Per Bidang Urusan

| Katagori Penilaian<br>Berdasarkan<br>Persentase<br>Realisasi<br>Keuangan | Bidang Urusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URUSAN DENGAN<br>CAPAIAN<br>(≥50)                                        | 1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| URUSAN DENGAN<br>CAPAIAN<br>(25≥50)                                      | 1. PENDIDIKAN<br>2. KESEHATAN<br>3. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT<br>4. SOSIAL<br>5. TENAGA KERJA<br>6. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>7. LINGKUNGAN HIDUP<br>8. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL<br>9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA<br>10. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA |

| Katagori Penilaian<br>Berdasarkan<br>Persentase<br>Realisasi<br>Keuangan | Bidang Urusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 11. PERHUBUNGAN<br>12. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>13. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH<br>14. PENANAMAN MODAL<br>15. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA<br>16. STATISTIK<br>17. PERPUSTAKAAN<br>18. PARIWISATA<br>19. PERTANIAN<br>20. SEKRETARIAT DAERAH<br>21. SEKRETARIAT DPRD<br>22. PERENCANAAN<br>23. KEUANGAN<br>24. KEPEGAWAIAN<br>25. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN<br>26. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>27. PENGELOLAAN PENGHUBUNG<br>28. INSPEKTORAT |
| URUSAN DENGAN<br>CAPAIAN<br>( 25≥)                                       | 1. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG<br>2. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN<br>3. PANGAN<br>4. PERSANDIAN<br>5. KEBUDAYAAN<br>6. KEARSIPAN<br>7. KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>8. KEHUTANAN<br>9. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>10. PERDAGANGAN<br>11. PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                   |

Sumber:Hasil Olahan Bappeda

Tabel 4.1 menunjukkan realisasi keuangan dimana dengan capaian dibawah 25 persen (≥25) sebanyak 11 Perangkat Daerah, dengan capaian 25 persen sampai dengan 50 persen ( 25≥50 ) sebanyak 28

Perangkat Daerah dan yang berada pada capaian diatas 50 persen ( $\leq 50$ ) ada 1 Perangkat Daerah.

#### **4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan II secara umum terkendala lelang dan e-katalog. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan sudah dilakukan implementasi kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan II secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



# **PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

## **TAHUN 2023**